

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian pelayanan yang ada di Kecamatan Pekuncen dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Selain itu, Kecamatan Pekuncen mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang terbatas sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi kurang maksimal. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn (1975), yang dikaji dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi Para Pelaksana, serta Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Teori ini dikembangkan untuk melihat bahwa implementasi kebijakan berjalan dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan di Kecamatan Pekuncen sudah cukup baik. Namun, Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan Pekuncen tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan Pekuncen hanya terdapat pelayanan non perizinan sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dijelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan administrasi terpadu kecamatan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar dan Sasaran Kebijakan di Kecamatan Pekuncen belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, dan Sumber Daya di Kecamatan Pekuncen masih belum optimal, sedangkan Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Organisasi, Disposisi Para Pelaksana, serta Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik sudah baik. Kecamatan Pekuncen diharapkan perlu menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 supaya pelayanan menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Kecamatan

SUMMARY

This research is motivated by the incompatibility of existing services in Pekuncen District with Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010. In addition, Pekuncen District has limited human and financial resources, resulting in less than optimal service. Referring to these problems, this study will examine the Implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010 concerning Guidelines for District Integrated Administrative Services in Pekuncen District, Banyumas Regency.

This study uses the theory of policy implementation according to Van Mater and Van Horn (1975), which is studied from Policy Standards and Targets, Resources, Inter-Organizational Communication, Characteristics of Implementing Organizations, Dispositions of Executors, and the Social, Economic, and Political Environment. This theory was developed to see that policy implementation proceeds from political decisions, implementers, and public policy performance.

The research method used is descriptive qualitative research method with the technique of selecting informants using purposive sampling technique. The data sources used are primary data sources and secondary data with data collection techniques, namely through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the service in Pekuncen District is quite good. However, the Minimum Service Standards (SPM) in Pekuncen District are not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010. This is because the Minimum Service Standards (SPM) in Pekuncen District only provide non-licensing services while in the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 explained that the scope of sub-district integrated administrative services includes licensing and non-licensing services.

The conclusions of this study indicate that the Policy Standards and Targets in Pekuncen District are not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010, and Resources in Pekuncen District are still not optimal, while Inter-Organizational Communication, Organizational Characteristics, Disposition of Executors, and the Social Environment , Economy, and Politics are good. Pekuncen Subdistrict is expected to adjust the Minimum Service Standards (SPM) with the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 so that services will be better.

Keywords: Policy Implementation, Public Service, District